TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR.1/Pdt.G/2023/PTA. Bn Jo NOMOR. 539/Pdt.G/2022/PA.AGM TENTANG HAK ASUH ANAK

Puji Ayu Lestari^{a1}, J.T Pareke^{b2}, Betra Sarianti^{c3}, Terletak di Tri Mayasari^{d4}

^{a1} Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata kunci: Implementasi, Hak asuh anak, Perceraian.

Pernikahan merupakan upaya untuk mempersatukan orang-orang yang berbeda satu sama lain, namun pada kenyataannya adanya ketidakharmonisan dalam menjalankan rumah tangga mengakibatkan perceraian, tentu tidak ada yang mengharapkan hal ini terjadi. Hal ini akan berdampak pada hak asuh anak secara umum, beberapa peristiwa mengenai pelaksanaan hak asuh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja pertimbangan hukum mengenai putusan nomor.1/Pdt.G/2023/PTA. Bn Jo nomor.539/Pdt.G/2022/PA.AGM tentang Hak Asuh Anak? (2) Apa saja kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara Nomor.1/Pdt.G/2023/PTA. Bn Jo Nomor.539.Pdt.G/2022/PA.AGM tentang Hak Asuh Anak? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan analisis bahan pustaka atau data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa fakta hukum dan aspek lainnya telah diterapkan dalam persidangan yang diadakan di Pengadilan Agama Arga Makmur, kemudian peneliti menemukan fakta bahwa setiap anak masih belum dewasa atau mumayiz (di bawah usia 12 tahun). Maka dari kejadian ini, kewajiban untuk merawat dan merawatnya adalah ibu kandung atau seseorang yang diberi wewenang namun memiliki kemampuan mental dan kepribadian yang baik.

ARTICLE INFO

Keywords: *Implementation, Child custody, Divorce.*

ABSTRACT

Marriage is an effort to unite people who are different from each other, but in reality the existence of disharmony in running a household results in divorce, of course no one expects this to happen. This will have an impact on child custody rights in general, several events regarding the implementation of child custody rights. This research aims to find out (1) What are the legal considerations regarding decision number.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn Jo number.539/Pdt.G/2022/PA.AGM concerning Child Custody Rights? (2) What are the obstacles faced by the judge in deciding case Number.1/Pdt.G/2023/PTA.Bn Jo Number.539.Pdt.G/2022/PA.AGM concerning Child Custody? This type of research uses normative legal research, which is legal research that uses analysis of library materials or secondary data. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique. And the results of research conducted by researchers show that legal facts and other aspects have been applied in trials held at the Arga Makmur Religious Court, then researchers discovered the fact that every child is still immature or mumayiz (under 12 years of age). So from this incident, the obligation to care for and care for him is the biological mother or someone who is given authority but who has good mental abilities and personality.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah pertemuan dua orang berbeda yang memiliki kepentingan dan perspektif hidup yang harmonis untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua orang pasti ingin pernikahan mereka tetap abadi sampai mati dan tidak ingin putus di tengah jalan. Namun, ada kalanya pernikahan tidak dapat dilanjutkan dan terpaksa putus di tengah jalan karena alasan tertentu. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian bervariasi, termasuk kematian pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan pendapat, perselingkuhan, dan banyak lagi.

Perceraian adalah pemisahan atau pemutusan hubungan suami istri. Di antara keduanya, kegiatan pemenuhan seksual dilarang, serta dipisahkan dari hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Menurut Soemiyati, perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dan ada alasan yang cukup mengapa suami dan istri tidak lagi dapat hidup harmonis sebagai suami dan istri. Tentu saja, tidak ada yang ingin pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Islam juga memandang bahwa masalah perceraian (talak) adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT meskipun diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, segala upaya dilakukan untuk menyelamatkan sebuah pernikahan. Namun, kenyataannya tetap ada laporan tingkat perceraian di Pengadilan Agama

dan di Pengadilan Negeri terus meningkat dari tahun ke tahun karena berbagai alasan yang mendasarinya.¹

Di Indonesia, angka perceraian terus meningkat. Di Indonesia, jumlah kasus perceraian akan mencapai 516.334 pada tahun 2022, didominasi oleh pasangan sederhana dari generasi milenial berusia 30-40 tahun.

Jika perceraian adalah pilihan terakhir dan tidak dapat dihindari yang menyebabkan pembubaran perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan timbul akibat hukum. Salah satu konsekuensi terpenting adalah hak asuh anak, juga dikenal sebagai *hadhanah* dalam bahasa Islam. Sama seperti pernikahan memberikan hak dan kewajiban, perceraian juga memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan.

Karena anak-anak adalah pihak yang paling dirugikan oleh perceraian, penulis ingin lebih memperhatikan masalah hak asuh anak setelah perceraian. Seorang anak bisa kehilangan cinta orang tuanya karena perceraian. Selain itu, kasih sayang ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan seorang anak. Masalah perceraian ini dapat menyebabkan trauma yang signifikan bagi anak-anak, terutama bagi anak-anak yang belum dewasa atau di bawah umur. Mereka akan merasa bahwa orang tua mereka tidak lagi mencintai mereka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak asuh adalah kewajiban orang tua untuk merawat, mendidik, mengasuh, mengembangkan, melindungi dan membina anak sesuai agama, kemampuan, bakat dan keinginan anak.²

¹ Soemiyati, 1999, Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.

² Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Untuk itu, perlu adanya aturan yang jelas, tegas dan spesifik yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus perkara hak asuh anak setelah perceraian. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

1. Pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibu.
2. Pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai hak pemeliharannya.
3. Biaya perawatan ditanggung oleh ayahnya.³

Dalam gugatannya yang diajukan Penggugat Konvensi pada 20 September 2022, ia mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA. AGM tanggal 22 September 2022. Penggugat Konvensi dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Juli 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai dengan Nomor: 403/Pdt.G/2022/PA. RUPST tanggal 25 Juli 2022 dengan Akta Cerai Nomor : XXX/AC/2022/PA. AGM, tanggal 10 Agustus 2022.⁴

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak (hadhanah) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Putusan Nomor: 539/Pdt.G/2022/PA. AGM. Dalam Reconvotion, Menyatakan klaim Penggugat Reconvotion tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Dalam Covention dan Reconvotion, Penggugat Perjanjian/Tergugat Reconvocation dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Membebankan Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul penelitian "TINJAUAN YURIDIS PERKARA NOMOR.1/Pdt.G/2023/PTA. Bn Jo NOMOR. 539/Pdt.G/2022/PA.AGM TENTANG HAK ASUH ANAK".

1.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan analisis bahan pustaka atau data sekunder. Teknik studi literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui berbagai kegiatan, seperti membaca, mengutip, mencatat buku, dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan subjek penelitian. Analisis berdasarkan data Analisis data induktif didasarkan pada data yang diperoleh secara kualitatif dan disusun secara sistematis dari hasil keputusan. Dengan kata lain, analisis data didasarkan pada data yang diperoleh, dikembangkan menjadi hipotesis, dikumpulkan lagi, dan kemudian dikumpulkan lagi sampai hipotesis tersebut disimpulkan.

DISKUSI

2.1 Pertimbangan Hukum Hak Asuh Anak dalam Putusan

³ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Putusan Nomor.539/Pdt.G/2022/PA. AGM. Hal 2

Nomor.1/Pdt.G/2023/PTA. Nomor Bn Jo. 539/Pdt.G/2022/PA. AGM

Menentukan hak asuh anak setelah perceraian sering melibatkan banyak pertimbangan hukum, termasuk kepentingan terbaik anak, kemampuan keuangan, dan stabilitas kedua orang tua. Dalam keputusan ini, hakim mungkin telah mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, lingkungan yang paling tepat untuk perkembangan mereka, dan peran masing-masing orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak.

Dalam hal ini, keputusan didasarkan pada bukti yang diajukan di persidangan, termasuk kesaksian dari kedua orang tua, laporan psikologis, dan bukti relevan lainnya. PTA.Bn dan PA. RUPS telah mempertimbangkan kebijakan hukum yang berlaku, seperti undang-undang tentang hak asuh anak dan prinsip-prinsip hukum keluarga.

Keputusan mengenai hak asuh anak setelah perceraian sangat penting karena memiliki dampak langsung pada kehidupan anak dan orang tuanya. Oleh karena itu, keputusan harus diambil dengan hati-hati, adil, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Dalam perkara hak asuh anak, majelis hakim memiliki pertimbangan hukum baik yuridis maupun non-yuridis, yaitu:

1. Pertimbangan yudisial

Pertimbangan yuridis dalam hal ini didasarkan pada beberapa aspek hukum yang relevan:

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Pasal ini mengatur biaya perkara dalam proses peradilan agama. Dalam hal ini, pasal tersebut mengatur bahwa biaya perkara pada tingkat pertama ditanggung oleh Penggugat/Pemohon Banding, sedangkan pada tingkat banding ditanggung oleh Tergugat/Pemohon Banding. Pertimbangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan finansial dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku: Pengadilan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses peradilan. Ini termasuk berbagai aturan hukum yang relevan untuk menyelesaikan kasus, termasuk prosedur dan substansi hukum yang mengatur kasus hak asuh anak seperti dalam kasus ini.

Terlepas dari aspek hukum positif yang diatur oleh hukum, pengadilan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum syariah yang relevan dengan kasus ini. Hal ini meliputi nilai-nilai keadilan, kesejahteraan anak, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum keluarga Islam yang mengatur hubungan antara orang tua dan anak.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, pengadilan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

2. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dalam hal ini melibatkan aspek-aspek di luar ranah hukum formal. Beberapa pertimbangan non-yuridis yang dapat diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan meliputi:

a) Kesejahteraan Anak

Salah satu pertimbangan utama adalah kesejahteraan anak. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang dibuatnya akan mempromosikan dan melindungi kepentingan terbaik anak, baik secara fisik, emosional dan psikologis. Ini mungkin melibatkan mempertimbangkan hubungan anak dengan kedua orang tua dan lingkungan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan anak.

b) Kemampuan Orang Tua

Pengadilan juga harus mempertimbangkan kemampuan kedua orang tua untuk

memberikan perawatan dan pemeliharaan bagi anak. Ini termasuk kemampuan keuangan, ketersediaan waktu, dan kualitas interaksi orang tua-anak.

c) Keseimbangan Emosional

Penting bagi pengadilan untuk menciptakan keseimbangan emosional dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa didengar dan dihormati, dan memperlakukan mereka secara adil dan obyektif tanpa prasangka atau preferensi yang tidak adil.

d) Ketidakberpihakan

Pengadilan harus menjaga ketidakberpihakan dan netralitas dalam menangani kasus. Ini termasuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti relevan yang disajikan di persidangan, tanpa menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil.

Pertimbangan (*considerans*) adalah dasar untuk keputusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang perkara dan pertimbangan hukum.

Pengadilan Agama Arga Makmur telah mempelajari berkas-berkas perkara, memeriksa dan mendengarkan keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan:

1. Duduklah dalam masalah ini

Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2022 telah mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang telah terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor.539/Pdt.G/2022/PA.RUPS, tanggal 22 September 2022. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Konvensi terjadi pada tanggal 4 Juli 2008. Mereka dikaruniai seorang putri pada 6 Januari 2017. Namun, pada 25 Juli 2022, perceraian terjadi di antara keduanya. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) karena berbagai alasan, termasuk ketidakadilan dalam pembagian pendapatan dan kekhawatiran tentang perkembangan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Setelah perceraian, Penggugat mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan dan hak asuh anak-anak. Mereka menyebutkan intimidasi dan ancaman fisik dari Terdakwa Konvensi. Tergugat menolak sebagian besar gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Mereka juga membantah beberapa aspek kronologi pernikahan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Pengadilan telah melakukan upaya mediasi untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Bahwa kasus ini melibatkan perselisihan mengenai hak asuh anak dan distribusi pemeliharaan pasca perceraian. Pengadilan perlu menilai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵

2. Pertimbangan Hukum

Pemohon Banding telah mengajukan banding dalam batas waktu yang ditentukan dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuat permintaan banding dapat diterima secara resmi. Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang meliputi surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur, dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Inti dari gugatan Penggugat/Pemohon Banding adalah meminta Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengabulkan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan alasan anak tersebut belum mencapai *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun) dan masih

⁵ Putusan Nomor.539/Pdt.G/2022/PA. AGM, hlm 2.

membutuhkan cinta dari ibu kandungnya.

Kemudian Tergugat/Pemohon Banding memberikan jawaban yang menyatakan bahwa meskipun anak tersebut masih di bawah umur, ia telah dirawat dengan baik dan merasa nyaman dengan Tergugat/Pemohon Banding, dan sulit baginya untuk dipisahkan dari keluarga Tergugat/Pemohon Banding.

Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Penggugat/Pemohon Banding sebagai seorang ibu layak dan patut untuk memiliki hak asuh atas anak tersebut. Majelis Hakim tingkat banding setuju dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama namun perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang akan dijelaskan lebih lanjut.

a). Dalam Konvensi

Majelis Hakim pada tingkat banding menilai bahwa pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh (hadhanah) atas seorang anak adalah keselamatan dan kepentingan anak, bukan hanya hak normatif orang tua. Ini menunjukkan bahwa keputusan harus didasarkan pada apa yang terbaik untuk anak. Meskipun terdapat perbedaan administratif dalam bukti perkawinan, anak tersebut telah berada dalam pengasuhan Tergugat/Pemohon Banding sebelum perceraian, dan upaya Penggugat/Pemohon Banding untuk menjemput anak tersebut telah dihalangi oleh Tergugat/Pemohon Banding. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat/Pemohon Banding wajib memberikan akses kepada Penggugat/Pemohon Banding untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.

Majelis hakim banding menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi faktor penentu dalam menentukan hak asuh. Ini termasuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dalam cinta ayah dan ibunya.

Meskipun Tergugat/Pemohon Banding adalah ayah kandung dari anak tersebut dan telah merawatnya dengan penuh kasih sayang, tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim Banding untuk menolak gugatan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding. Oleh karena itu, hak asuh anak diberikan kepada Penggugat/Pemohon Banding. Majelis Hakim Banding menyetujui nominal biaya/tunjangan anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun menambahkan 10% per tahun dari kewajiban yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.⁶

Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara ini didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, serta berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku untuk pemenuhan hak asuh dan dukungan anak.

b). Dalam Rekonvensi

Pertimbangan Antara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyatakan setuju dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama Arga Makmur pada tingkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa argumentasi dan pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dianggap sah dan cukup kuat untuk diterima.

⁶ Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA. Bn

Dalam menguatkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menegaskan bahwa putusan pertama yang menyatakan bahwa gugatan rekonsvansi Tergugat/Pemohon Banding tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard) tetap berlaku. Ini menegaskan konsistensi antara tingkat pertama dan banding dalam penegakan hukum. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menguatkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan merevisi putusan tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan kejelasan atas tindakan yang harus diambil oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, pertimbangan ini menunjukkan bahwa pengadilan banding dengan hati-hati mempertimbangkan argumen dan pertimbangan hukum yang diajukan oleh pengadilan tingkat pertama, dan memastikan konsistensi dan kejelasan keputusan yang diambil. Hal ini mencerminkan upaya pengadilan untuk memberikan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam perkara hak asuh anak, majelis hakim memiliki pertimbangan hukum baik yuridis maupun non-yuridis, yaitu:

1. Pertimbangan yudisial

Pertimbangan yuridis dalam hal ini didasarkan pada beberapa aspek hukum yang relevan:

- a) Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Pasal ini mengatur biaya perkara dalam proses peradilan agama. Dalam hal ini, pasal tersebut mengatur bahwa biaya perkara pada tingkat pertama ditanggung oleh Penggugat/Pemohon Banding, sedangkan pada tingkat banding ditanggung oleh Tergugat/Pemohon Banding. Pertimbangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan finansial dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

- b) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku: Pengadilan mempertimbangkan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses peradilan. Ini termasuk berbagai aturan hukum yang relevan untuk menyelesaikan kasus, termasuk prosedur dan substansi hukum yang mengatur kasus hak asuh anak seperti dalam kasus ini.

- c) Terlepas dari aspek hukum positif yang diatur oleh hukum, pengadilan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum syariah yang relevan dengan kasus ini. Hal ini meliputi nilai-nilai keadilan, kesejahteraan anak, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum keluarga Islam yang mengatur hubungan antara orang tua dan anak.

2. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dalam hal ini melibatkan aspek-aspek di luar ranah hukum formal. Beberapa pertimbangan non-yuridis yang dapat diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan meliputi:

- a) Kesejahteraan Anak

Salah satu pertimbangan utama adalah kesejahteraan anak. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang dibuatnya akan mempromosikan dan melindungi kepentingan terbaik anak, baik secara fisik, emosional dan psikologis. Ini mungkin melibatkan

mempertimbangkan hubungan anak dengan kedua orang tua dan lingkungan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan anak.

b) Kemampuan Orang Tua

Pengadilan juga harus mempertimbangkan kemampuan kedua orang tua untuk memberikan perawatan dan pemeliharaan bagi anak. Ini termasuk kemampuan keuangan, ketersediaan waktu, dan kualitas interaksi orang tua-anak.

c) Keseimbangan Emosional

Penting bagi pengadilan untuk menciptakan keseimbangan emosional dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa didengar dan dihormati, dan memperlakukan mereka secara adil dan obyektif tanpa prasangka atau preferensi yang tidak adil.

d) Ketidakberpihakan

Pengadilan harus menjaga ketidakberpihakan dan netralitas dalam menangani kasus. Ini termasuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti relevan yang disajikan di persidangan, tanpa menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil.

2.2 Hambatan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor.539/Pdt.G/2022/PA. RUPST tentang Hak Asuh Anak.

Berdasarkan pertimbangan yang dinyatakan dalam putusan, beberapa kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara hak asuh anak antara Penggugat/Pemohon Banding dan Tergugat/Pemohon Banding antara lain:

- a. Terdapat perbedaan antara bukti-bukti administratif yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding dengan Tergugat/Pemohon Banding, seperti akta nikah dan dokumen lainnya. Perbedaan ini dapat menjadi hambatan dalam menentukan fakta yang relevan untuk memutuskan kasus.
- b. Hakim mungkin menghadapi kesulitan dalam memastikan fakta yang benar terkait dengan status perkawinan, pemeliharaan anak, dan interaksi antara kedua belah pihak. Terutama ketika ada versi yang berbeda atau kesaksian yang bertentangan dari kedua belah pihak.
- c. Hakim perlu mempertimbangkan keselamatan dan kepentingan terbaik anak saat memutuskan hak asuh. Ini bisa menjadi hambatan jika tidak semua informasi atau bukti yang diperlukan untuk menilai keselamatan dan minat anak tersedia atau jelas.
- d. Terkadang, perbedaan pendapat antara Penggugat/Pemohon Banding dan Tergugat/Pemohon Banding dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang memadai mengenai hak asuh anak. Hal ini dapat membuat proses peradilan menjadi lebih rumit dan membutuhkan analisis yang lebih mendalam oleh hakim.

Perbedaan ini terutama terlihat dalam dokumen-dokumen seperti akta nikah dan dokumen lain yang diajukan oleh Penggugat / Pemohon Banding dan Tergugat / Pemohon Banding. Perbedaan ini dapat menjadi hambatan serius dalam menentukan

fakta-fakta yang relevan untuk memutuskan kasus. Hakim harus berusaha memastikan keabsahan dan kebenaran dokumen yang diserahkan oleh kedua belah pihak. Namun, jika ada perbedaan yang signifikan dalam bukti administrasi, ini dapat mempersulit proses penentuan fakta yang akurat dan mengganggu kejelasan kasus.

Dalam keputusan 539/Pdt.G/2022/PA.AGM, kendala yang dialami majelis hakim adalah adanya kesalahan nama Tergugat dalam Surat Gugatan dan dalam surat panggilan pengadilan dengan nama Purnawan Wijaya, padahal nama yang benar adalah Purnawan Jaya sesuai dengan identitas Tergugat dalam Buku Nikah Asli milik Tergugat dan nomor Penggugat: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 11 Januari 2016, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat berada pada orang yang salah atau salah digugat dan dapat dinyatakan *Error En Persona*;

Sedangkan Kesalahan dalam *Persona* pada dasarnya adalah kesalahan oleh pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau kesalahan oleh pihak yang bertindak sebagai Tergugat yang akan mengakibatkan klaim penggugat cacat secara formal, Kesalahan dalam *Persona* dapat diklasifikasikan

1. Diskualifikasi secara Pribadi, yaitu mereka yang bertindak sebagai Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan (diskualifikasi) karena: mereka tidak memiliki hak untuk menuntut kasus yang disengketakan, mereka tidak kompeten untuk mengambil tindakan hukum,
2. Salah sasaran adalah pihak yang digugat, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru atau orang yang salah (*gemis aanhoeda nighead*),
3. Gugatan tidak memiliki pihak (*konsorsium plurium litis*) artinya tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik kembali sebagai Tergugat.⁷

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi adalah orang yang sama dengan Tergugat Konvensi (lihat bukti T-1), kecuali terdapat sedikit perbedaan dalam ejaan nama, namun hal ini tidak membuat gugatan Penggugat cacat secara formal karena tidak memenuhi unsur-unsur Kesalahan in *Personas*. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat terhadap Konvensi tentang Kesalahan in *Persona* harus dinyatakan ditolak;⁸

Selanjutnya, Tergugat Konvensi mengajukan *Obscure Libel Exception* (gugatan tidak jelas/tidak jelas) dengan argumen: Bahwa pada poin 1 gugatan Penggugat, baik surat gugatan awal maupun surat gugatan yang telah dikoreksi oleh penggugat melalui kuasa hukumnya, adalah tidak benar, yang benar adalah penggugat dan tergugat menikah pada hari Senin, Tanggal 11 Januari 2016, berdasarkan Surat Nikah Nomor kutipan: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 11 Januari 2016, oleh karena itu Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat tidak benar dan Tergugat dengan tegas menolak kebenarannya dan dapat dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 117 - 119)

⁸ Putusan nomor.539/Pdt.G/2022/PA. AGM.

jelas (tidak jelas atau tidak jelas);

Penggugat Konvensi dalam jawabannya berpendapat bahwa hal itu tidak benar karena Penggugat merujuk pada Kutipan Akta Nikah Rangkap yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kota Arga Makmur dan sebenarnya Buku Nikah Asli Penggugat dikuasai oleh Tergugat.

Jenis gugatan yang mengandung cacat pencemaran nama baik yang tidak jelas adalah jenis gugatan yang tidak memenuhi persyaratan yang jelas dan pasti (duidelijk en bepaalde conclusie) yang diuraikan dalam Pasal 8 sampai dengan 3 Rv. Oleh karena itu, spektrum klaim yang tidak jelas sangat luas, dan meliputi:

1. Argumentasi gugatan atau dasar permohonan tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
2. Perselisihan yang tidak jelas,
3. Petitum tidak jelas, dan gugatan mengandung unsur Nebis in idem.

Majelis Hakim akhirnya menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk gugatan pencemaran nama baik tersembunyi yang disebutkan sebelumnya. Karena itu, pengecualian harus ditolak.

Kesimpulan

putusan Pengadilan Agama Arga Makmur mengacu pada kronologis perkara, fakta hukum dan peristiwa hukum yang terbukti dan terjadi selama persidangan. Oleh karena itu, penerapan pasal 105 KHI tidak dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan aspek lain. Anak-anak yang belum dewasa atau mumayiz (di bawah 12 tahun) atau belum dapat berdiri sendiri harus dibesarkan oleh ibu kandung atau seseorang yang diberi otoritas tetapi yang memiliki kemampuan mental dan kepribadian yang baik. Anak kandung atau anak yang orang tuanya sudah bercerai dan diasuh oleh ibunya.

BLIBLIOGRAFI

- Abdul Gani Abdullah, 1991 *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, PT Internasa, Jakarta.
- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqih Munakahat*, Kencana Penada Media Group, Jakarta.
- Ali Zainudin, 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Amir Sarifuddin, 2006 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta.
- Bisma Siregar, 1983, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Kamal Mukhtar, 1987, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, T.tp, CV. Nuansa Aulia.
- P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta.
- R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio, 2004 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta.